

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAL MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³
Ilmu Administrasi dan Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia^{1,2,3}

Corresponding Author: dandidio50@gmail.com¹,
muhammadanggisaputra52@gmail.com², nielwaty@gmail.com³

Info Artikel

Submitted: 30 Mei 2026

Revised : 07 Juni 2026

Accepted: 27 Juni 2026

Published: 30 Juni 2026

Keywords: community participation, village development planning, Musrenbang, tokenism, village governance.

Kata Kunci: partisipasi masyarakat, perencanaan pembangunan desa, Musrenbang, tokenisme, tata kelola desa.

Abstract

This study aims to analyze community participation in development planning in Jambal Makmur Village, Kandis District, Siak Regency, Riau Province. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving five purposively selected informants, comprising the village head, village secretary, BPD members, community leaders, and ordinary residents. The findings reveal that: (1) participation in decision-making has not been substantively realized, as community presence in Musrenbangdes has not been matched by the meaningful integration of residents' aspirations into the RKPDes; (2) participation in implementation is relatively strong, evidenced by active community involvement in infrastructure development through the practice of mutual cooperation; (3) benefits from development outcomes are unevenly distributed, with women and agricultural laborers receiving a disproportionately smaller share of advantages; and (4) participation in evaluation is the weakest dimension, constrained by limited budget transparency and the absence of effective feedback channels outside the annual Musrenbangdes cycle. Key structural barriers include village elite dominance in deliberative forums, low policy literacy among residents, and inadequate information dissemination. Strengthening the Musrenbangdes mechanism on the basis of inclusion and budgetary transparency is the primary recommendation of this study.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jambal Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi kepala desa, sekretaris desa, anggota BPD, tokoh masyarakat, dan warga biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan belum berjalan secara substantif, karena kehadiran fisik warga dalam Musrenbangdes tidak diikuti oleh pengintegrasian aspirasi mereka ke dalam dokumen RKPDes secara bermakna; (2) partisipasi dalam pelaksanaan berjalan relatif baik, ditandai dengan kuatnya semangat gotong royong dalam kegiatan pembangunan infrastruktur; (3) pemanfaatan hasil pembangunan belum terdistribusi secara merata, khususnya bagi kelompok perempuan dan buruh tani yang memperoleh porsi manfaat lebih kecil; serta (4) partisipasi dalam evaluasi merupakan dimensi yang paling lemah, akibat minimnya transparansi anggaran dan terbatasnya saluran aspirasi warga di luar siklus tahunan Musrenbangdes. Hambatan utama yang teridentifikasi meliputi

dominasi elite desa dalam forum deliberasi, rendahnya literasi kebijakan warga, dan distribusi informasi yang tidak memadai. Penguatan mekanisme Musrenbangdes berbasis inklusi dan transparansi anggaran menjadi rekomendasi utama penelitian ini.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa pada hakikatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Dalam kerangka pembangunan yang demokratis, masyarakat tidak semata-mata berperan sebagai objek yang menerima hasil kebijakan, melainkan sebagai subjek yang terlibat aktif dalam setiap tahapannya. Partisipasi masyarakat menjadi fondasi yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan, karena masyarakat sendiri yang paling memahami kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang ada di lingkungannya. Pembangunan yang tidak berakar pada partisipasi warga cenderung melahirkan program-program yang tidak tepat sasaran, tidak berkelanjutan, dan pada akhirnya gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara nyata.

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, memprioritaskan kebutuhan, dan turut memutuskan arah pembangunan. Dalam perspektif tata kelola desa yang inklusif, keterlibatan warga dalam setiap siklus perencanaan bukan sekadar hak prosedural, melainkan prasyarat mendasar bagi legitimasi dan efektivitas kebijakan publik di tingkat desa (Wijaya & Suharto, 2021). Prinsip pembangunan yang berpusat pada manusia menegaskan bahwa masyarakat harus menjadi pemain utama dalam pembangunan, bukan sekadar penerima pasif program pemerintah.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan forum musyawarah tahunan warga dan *stakeholder* desa untuk membahas dan menyepakati perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan di desa dalam tahun anggaran berikutnya, dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa, kinerja implementasi rencana tahun berjalan serta masukkan dari nara sumber dan peserta yang menggambarkan permasalahan nyata yang dihadapi. Musrenbang bertujuan agar pembangunan lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa inilah unsur-unsur lembaga masyarakat, tokoh masyarakat, dan masyarakat sendiri yang mewakili unsur masyarakat di desa diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan pembangunan bagi kepentingan masyarakat setempat.

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAI
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang melibatkan masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Perencanaan ini memerlukan partisipasi masyarakat yang baik agar kebutuhan masyarakat diketahui sampai ke daerah. Peranan masyarakat dalam pembangunan saat ini tidak hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Prinsip pembangunan yang berpusat pada manusia menekankan bahwa masyarakat harus menjadi pemain utama dalam pembangunan.

Pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa musyawarah desa merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan di tingkat desa, yang wajib melibatkan seluruh unsur masyarakat. Sebagai turunannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa mewajibkan penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai wadah partisipasi warga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) setiap tahun anggaran. Kerangka regulasi ini menempatkan warga desa sebagai aktor utama yang menentukan prioritas pembangunan di wilayahnya sendiri.

Namun, dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, partisipasi masyarakat masih menghadapi sejumlah tantangan nyata. Desa ini berada di kawasan perkebunan kelapa sawit dengan mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani dan buruh sawit. Kesibukan dalam bekerja membuat sebagian besar warga tidak dapat hadir dalam seluruh tahapan musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa. Selain itu, kurangnya penyebaran informasi mengenai jadwal dan mekanisme Musrenbangdes menyebabkan warga tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan usulan yang terstruktur. Akibatnya, proses pengambilan keputusan dalam forum Musrenbangdes cenderung didominasi oleh perangkat desa dan tokoh-tokoh tertentu, sementara suara masyarakat umum belum sepenuhnya terakomodasikan dalam dokumen perencanaan yang dihasilkan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan regulasi dengan kenyataan di lapangan, di mana forum Musrenbangdes yang seharusnya menjadi ruang partisipasi yang bermakna belum sepenuhnya mampu menampung dan mengintegrasikan suara seluruh lapisan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan desa. Sebagai salah satu desa yang berada di wilayah dengan dinamika sosial-ekonomi yang tinggi, desa ini menghadapi tantangan ganda, di satu sisi terdapat tekanan konversi lahan dan pergeseran mata pencaharian akibat

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAI
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

ekspansi industri, di sisi lain tuntutan akan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang berkualitas semakin meningkat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jambai Makmur secara mendalam, guna memperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk, tingkat, faktor pendukung, serta hambatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa.

LANDASAN TEORI

Partisipasi masyarakat merupakan konsep yang sangat sentral dalam setiap kegiatan pembangunan. Saat ini, kata “partisipasi” hampir menjadi kata kunci dalam setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat atau program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam kajian tata kelola desa kontemporer, partisipasi masyarakat didefinisikan sebagai keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam seluruh tahapan proses pembangunan, meliputi pemikiran, tenaga, waktu, keahlian, dan sumber daya lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan prioritas warga (Prianto & Kurniawan, 2019). Partisipasi bukan hanya berarti kehadiran fisik dalam forum, tetapi mencakup kebermaknaan suara warga dalam seluruh siklus pengambilan keputusan. Sejumlah penelitian terkini menegaskan bahwa kualitas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana ruang deliberasi yang tersedia mampu mengakomodasi keberagaman kepentingan lintas kelompok, termasuk kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya (Haryanto, 2020; Nugroho & Fatimah, 2022). Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, antara lain: kontribusi gagasan dan pemikiran dalam forum musyawarah; sumbangan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan; keterlibatan dalam *monitoring* dan evaluasi program; serta dukungan material dan finansial secara swadaya.

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada konseptualisasi partisipasi masyarakat yang dikembangkan dalam studi-studi tata kelola desa dan pemberdayaan komunitas di Indonesia, khususnya yang menempatkan Musrenbangdes sebagai arena utama partisipasi. Merujuk pada Cohen dan Uphoff (dalam Safitri,dkk., 2022) yang mengadaptasi dimensi partisipasi untuk konteks desa di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat dipilah ke dalam empat dimensi yang saling berkaitan. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), yakni keterlibatan aktif

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAL
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

warga dalam menentukan arah, prioritas, dan mekanisme pembangunan yang akan dilaksanakan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan (*implementation*), yang mencakup mobilisasi sumber daya, koordinasi kegiatan, serta kontribusi nyata warga dalam merealisasikan program yang telah disepakati bersama. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*benefits*), berupa akses warga terhadap keluaran dan dampak positif dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi (*evaluation*), yaitu keterlibatan warga dalam menilai, mengawasi, dan memberikan umpan balik atas pelaksanaan dan hasil program, sehingga siklus perencanaan berikutnya dapat berjalan lebih responsif. Keempat dimensi ini menjadi kerangka analisis yang digunakan untuk membaca kondisi partisipasi masyarakat di Desa Jambal Makmur secara komprehensif, dengan mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi dan kapasitas kelembagaan desa yang bersangkutan.

Dalam konteks regulasi desa di Indonesia, kerangka partisipasi tersebut mendapatkan landasan normatifnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunannya. Namun, sejumlah kajian empiris terkini menunjukkan bahwa pelaksanaan partisipasi di lapangan masih jauh dari ideal. Penelitian Apriliani & Martini (2023) tentang Musrenbang di desa-desa di Jawa Barat menemukan bahwa dominasi elite lokal dalam forum perencanaan masih menjadi hambatan struktural utama yang menyebabkan aspirasi kelompok marjinal tidak terakomodasi secara substantif. Senada dengan itu, Setiawan & Hidayat (2021) mengidentifikasi bahwa rendahnya literasi kebijakan warga dan minimnya aksesibilitas informasi anggaran menjadi faktor penghambat utama bagi terwujudnya partisipasi yang bermakna di tingkat desa. Temuan-temuan ini relevan untuk menjadi cermin analisis kondisi Musrenbangdes di Desa Jambal Makmur, yang menghadapi tantangan serupa dalam konteks sosial-ekonomi wilayah perkebunan kelapa sawit.

Partisipasi masyarakat mengacu pada praktik yang melibatkan penduduk setempat dalam semua tahap pembangunan, mulai dari konseptualisasi hingga pelaksanaan hingga penilaian hasil. Inisiatif yang disediakan pemerintah mendapat manfaat dari keterlibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) merupakan forum utama perwujudan partisipasi tersebut, yang secara normatif diamanatkan oleh Permendagri No. 114 Tahun 2014 sebagai mekanisme wajib dalam siklus perencanaan pembangunan desa tahunan. Musrenbangdes idealnya dilaksanakan secara bertahap, dimulai dari musyawarah tingkat dusun atau RW untuk menggali kebutuhan di tingkat basis, kemudian diakomodasikan dalam forum desa yang melibatkan seluruh elemen

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAI
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

masyarakat, BPD, lembaga kemasyarakatan, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda. Hasil Musrenbangdes kemudian dituangkan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang menjadi acuan penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya. Namun dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih terbatas pada kehadiran fisik, yang dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Pendekatan personal oleh pemerintah desa belum optimal karena kurangnya dukungan sistem terstruktur dan teknologi informasi. Usaha pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan desa harus dibangun dengan berorientasi pada potensi fiskal, melibatkan masyarakat, serta adanya usaha yang mengarah pada kemandirian masyarakat desa.

Dalam perspektif teoritis, Cohen dan Uphoff (dalam Safitri, dkk., 2022) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan desa mencakup empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu: (1) partisipasi dalam pengambilan keputusan (*decision making*), yaitu keterlibatan warga dalam menentukan prioritas dan kebijakan pembangunan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan (*implementation*), yakni keikutsertaan aktif dalam proses pembangunan yang telah direncanakan; (3) partisipasi dalam pemanfaatan hasil (*benefits*), berupa akses nyata masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; dan (4) partisipasi dalam evaluasi (*evaluation*), yaitu kemampuan masyarakat menilai dan mengawasi jalannya pembangunan. Keempat indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai apakah mekanisme Musrenbang yang ada benar-benar memfasilitasi partisipasi yang bermakna bagi seluruh lapisan warga, atau hanya bersifat seremonial dan prosedural belaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena partisipasi masyarakat secara mendalam, kontekstual, dan holistik sebagaimana terjadi di lapangan. Penelitian dilaksanakan di Desa Jambai Makmur, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria bahwa informan memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses perencanaan pembangunan desa. Informan berjumlah lima orang, terdiri atas kepala desa, Sekertaris desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga biasa yang pernah mengikuti Musrenbangdes.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, observasi langsung. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) kepada para informan guna menggali informasi

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAL
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

yang rinci dan kontekstual. Ketiga, dokumentasi melalui penelaahan dokumen resmi desa seperti notulensi Musrenbangdes, RKPDes, dan laporan kegiatan.

HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum musyawarah tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Jambal Makmur bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyepakati rencana kerja dalam pelaksanaan pembangunan. Forum ini menjadi arena utama perwujudan partisipasi warga dalam menentukan prioritas pembangunan, berdasarkan kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat di tingkat dusun hingga desa. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen, berikut ini dipaparkan kondisi partisipasi masyarakat Desa Jambal Makmur berdasarkan empat dimensi utama.

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)

Partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan dimensi pertama dan paling fundamental dalam siklus perencanaan pembangunan desa. Pada dimensi ini, keterlibatan masyarakat diukur dari sejauh mana warga turut menentukan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan dan cara mencapai tujuan pembangunan. Dalam konteks Desa Jambal Makmur, dimensi ini diwujudkan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang diselenggarakan setiap tahun anggaran sebagai wadah resmi penyaringan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Jambal Makmur dapat dikategorikan cukup baik. Masyarakat hadir dalam forum, menyampaikan usulan, dan mengikuti jalannya musyawarah. Hal ini sejalan dengan pengakuan kepala desa dan perangkat desa bahwa Musrenbangdes selalu berhasil dilaksanakan dengan dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing dusun, tokoh masyarakat, anggota BPD, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Meski demikian, bila dicermati lebih jauh, kehadiran warga dalam forum tersebut belum sepenuhnya berkorelasi dengan keterlibatan substantif dalam pengambilan keputusan. Masyarakat memang diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, namun tidak terdapat jaminan institusional yang memastikan bahwa usulan warga akan secara nyata mempengaruhi dokumen perencanaan yang dihasilkan. Beberapa usulan yang disampaikan warga dalam sesi musyawarah tidak muncul dalam dokumen RKPDes akhir, tanpa disertai penjelasan yang memadai kepada peserta forum.

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAI
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

Temuan lapangan mengungkap bahwa proses deliberasi dalam forum Musrenbangdes cenderung didominasi oleh perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Sebagian besar warga biasa, terutama kelompok petani sawit, buruh harian, dan ibu rumah tangga, cenderung bersikap pasif dan menyerahkan pengambilan keputusan kepada "orang-orang yang lebih tahu." Kondisi ini tidak sepenuhnya merupakan kesalahan warga, melainkan bersumber dari hambatan struktural: penyebaran informasi jadwal Musrenbangdes yang kurang memadai menyebabkan warga tidak memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan usulan yang terstruktur. Akibatnya, ketika forum berlangsung, warga hadir tanpa persiapan dan lebih memilih mendengar daripada bersuara.

Pola tersebut menunjukkan bahwa forum Musrenbangdes di Desa Jambai Makmur belum sepenuhnya berfungsi sebagai arena pembentukan keputusan secara kolektif dan setara. Forum yang semestinya menjadi ruang partisipasi bermakna bagi seluruh warga, dalam praktiknya lebih banyak beroperasi sebagai arena konfirmasi atas rencana yang telah dirumuskan sebelumnya oleh perangkat desa dan tokoh-tokoh berpengaruh. Dengan demikian, partisipasi masyarakat Desa Jambai Makmur dalam dimensi pengambilan keputusan masih perlu diperkuat, terutama dalam hal inklusivitas forum, keterbukaan informasi, dan jaminan bahwa aspirasi warga benar-benar terserap dalam dokumen perencanaan yang mengikat.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan (*Implementation*)

Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Dalam pelaksanaan program pembangunan, yang mencakup mobilisasi sumber daya, koordinasi kegiatan, serta kontribusi aktif warga dalam merealisasikan program yang telah disepakati. Berbeda dengan dimensi pengambilan keputusan yang masih menunjukkan keterbatasan, partisipasi masyarakat Desa Jambai Makmur dalam tahap pelaksanaan menunjukkan gambaran yang lebih positif dan konkret.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, masyarakat Desa Jambai Makmur secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan gotong royong yang menjadi bagian dari pelaksanaan program pembangunan desa. Kontribusi warga diwujudkan dalam tiga bentuk utama: pertama, sumbangan tenaga dalam kegiatan pembangunan fisik seperti perbaikan jalan lingkungan, pembersihan saluran drainase, dan pembuatan fasilitas umum; kedua, sumbangan material berupa bahan bangunan yang dikumpulkan secara swadaya oleh masyarakat untuk mendukung kegiatan pembangunan skala kecil di tingkat RT dan RW; dan ketiga, keterlibatan dalam koordinasi pelaksanaan di lapangan melalui peran ketua RT dan ketua dusun sebagai penghubung antara pemerintah desa dan warga.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAL MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

Semangat gotong royong yang masih kuat di Desa Jambal Makmur menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mendorong partisipasi pada tahap pelaksanaan. Warga bersedia menyumbangkan waktu dan tenaga, terutama untuk program-program yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh lingkungan mereka. Program perbaikan jalan antar-dusun dan pembangunan drainase, misalnya, mendapatkan antusiasme gotong royong yang tinggi karena keduanya bersentuhan langsung dengan mobilitas dan aktivitas sehari-hari warga. Hal ini menunjukkan bahwa ketika masyarakat melihat relevansi langsung suatu program terhadap kebutuhan hidup mereka, motivasi untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan pun meningkat secara signifikan.

Akan tetapi, partisipasi dalam pelaksanaan ini mengandung keterbatasan yang perlu dicermati. Keterlibatan aktif warga pada tahap ini tidak selalu disertai oleh rasa kepemilikan (*sense of ownership*) yang kuat terhadap program secara keseluruhan. Hal ini merupakan konsekuensi langsung dari lemahnya partisipasi pada tahap pengambilan keputusan sebelumnya: ketika warga tidak terlibat secara substantif dalam merumuskan program, mereka pun tidak merasa memiliki program tersebut secara penuh. Mereka berpartisipasi dalam pelaksanaan karena ajakan atau kewajiban sosial, bukan karena mereka merasa menjadi pemilik dari rencana yang sedang direalisasikan. Akibatnya, keterlibatan warga dalam pelaksanaan bersifat responsif dan situasional, bukan proaktif dan sistematis.

Faktor penghambat partisipasi dalam pelaksanaan juga berkaitan dengan mayoritas mata pencaharian warga sebagai petani dan buruh sawit. Waktu kerja yang padat dan tidak menentu menyebabkan sebagian warga tidak dapat hadir secara konsisten dalam seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu lebih fleksibel dalam menjadwalkan kegiatan partisipasi masyarakat, agar seluruh lapisan warga memiliki kesempatan yang setara untuk terlibat, bukan hanya mereka yang kebetulan memiliki waktu luang pada saat kegiatan diselenggarakan.

3. Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil (*Benefits*)

Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak terlepas dari kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan pembangunan yang bisa dicapai. Dari segi kualitas keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari seberapa besar prosentase keberhasilan program yang dilaksanakan apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau tidak. Masyarakat dapat mengambil manfaat dari hasil pembangunan desa yang telah ditetapkan, oleh karena itu masyarakat harus ikut andil dalam setiap rencana yang telah dibuat oleh pemerintah.

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAI
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

Secara umum, masyarakat Desa Jambai Makmur telah memanfaatkan berbagai hasil pembangunan desa yang telah dilaksanakan, mencakup perbaikan infrastruktur jalan lingkungan, pembangunan drainase, fasilitas pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi warga. Masyarakat merasakan manfaat nyata dari perbaikan jalan yang memperlancar mobilitas, terutama untuk kebutuhan distribusi hasil panen sawit dan akses ke fasilitas layanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua program yang dilaksanakan kehilangan relevansinya di mata warga.

Namun demikian, terdapat persoalan penting dalam dimensi pemanfaatan ini yang tidak dapat diabaikan. Pertama, kemampuan masyarakat dalam merawat dan memelihara hasil pembangunan masih tergolong rendah. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun mengalami kerusakan lebih cepat dari seharusnya akibat kurangnya pemeliharaan oleh warga. Kondisi ini bukan semata-mata persoalan kesadaran, melainkan juga cerminan dari rendahnya rasa kepemilikan yang disebabkan oleh minimnya keterlibatan warga dalam proses perencanaan sejak awal. Ketika warga tidak merasa ikut merencanakan suatu program, mereka pun tidak merasa berkewajiban untuk merawatnya.

Kedua, distribusi manfaat pembangunan belum merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kelompok masyarakat yang memiliki akses lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan dalam forum Musrenbangdes cenderung lebih berhasil dalam memperjuangkan program yang memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan kepentingan mereka. Sebaliknya, kelompok yang terpinggirkan dari forum deliberasi, seperti perempuan, buruh tani, dan warga di dusun terpencil, mendapatkan porsi manfaat yang relatif lebih kecil. Kondisi ini mempertegas adanya hubungan langsung antara kualitas keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan dengan tingkat pemerataan akses terhadap hasil-hasil pembangunan yang dihasilkan.

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa ketimpangan dalam distribusi manfaat ini bukan semata persoalan teknis keterbatasan anggaran, melainkan mencerminkan ketimpangan dalam akses terhadap ruang pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemerataan manfaat pembangunan tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu membenahi ketimpangan partisipasi pada tahap perencanaan. Selama kelompok-kelompok tertentu masih terpinggirkan dari proses deliberasi, program yang dilaksanakan akan cenderung kurang menyentuh kebutuhan mendasar mereka.

4. Partisipasi dalam Evaluasi (*Evaluation*)

Setelah perencanaan dan pelaksanaan, tahap selanjutnya adalah pengawasan dan evaluasi pembangunan. Agak sedikit berbeda dengan tahapan sebelumnya, dalam tahap ini pemerintah lebih mendominasi. Dominasi ini terutama dapat dilihat dalam pengawasan pembangunan fisik. Partisipasi dalam evaluasi merupakan dimensi yang paling berdampak dalam jangka panjang, karena ia menentukan apakah siklus perencanaan-pelaksanaan-evaluasi pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan warga.

Secara formal, mekanisme evaluasi dalam Musrenbangdes di Desa Jambal Makmur telah berjalan: setiap penyelenggaraan Musrenbangdes diawali dengan agenda evaluasi terhadap realisasi program tahun sebelumnya, sebelum memasuki pembahasan program baru. Forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menilai sejauh mana program yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan harapan. Dalam hal ini, BPD berperan sebagai lembaga pengawas yang secara normatif berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi evaluatif masyarakat kepada pemerintah desa.

Namun, efektivitas mekanisme evaluasi ini masih sangat terbatas dalam praktiknya. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar warga mengaku tidak memiliki informasi yang memadai mengenai realisasi program dan penggunaan Dana Desa pada tahun sebelumnya. Minimnya transparansi informasi anggaran desa kepada publik menyebabkan warga tidak dapat melakukan penilaian yang kritis dan berbasis fakta. Ketika warga tidak mengetahui berapa anggaran yang dialokasikan, berapa yang terealisasi, dan bagaimana kualitas pelaksanaannya, maka evaluasi yang dilakukan dalam forum pun hanya bersifat normatif dan seremonial, bukan evaluasi yang sesungguhnya.

Kondisi ini juga diperkuat oleh kenyataan bahwa mekanisme umpan balik formal dari masyarakat di luar siklus tahunan Musrenbangdes hampir tidak tersedia. Warga tidak memiliki saluran institusional yang efektif untuk menyampaikan keluhan, koreksi, atau penilaian atas program yang sedang berjalan, selain menunggu forum Musrenbangdes berikutnya yang baru diselenggarakan setahun sekali. Fungsi BPD sebagai jembatan aspirasi pun belum berjalan optimal, karena keterbatasan kapasitas dan kurangnya inisiatif untuk menjangkau warga secara aktif di luar momen musyawarah resmi.

Kondisi tersebut menegaskan bahwa dimensi evaluasi menjadi yang paling lemah dalam keseluruhan rantai partisipasi masyarakat Desa Jambal Makmur. Tanpa adanya akses informasi yang memadai dan saluran aspirasi yang berkelanjutan, warga tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan yang sesungguhnya atas jalannya pembangunan. Penguatan

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAL
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

dimensi evaluasi, melalui publikasi laporan realisasi program secara berkala, peningkatan kapasitas BPD dalam menjangkau warga, serta pembukaan saluran aspirasi yang lebih aksesibel di luar siklus musyawarah tahunan, menjadi agenda mendesak agar partisipasi masyarakat Desa Jambal Makmur dapat berkembang menjadi partisipasi yang benar-benar bermakna dan berdampak nyata bagi seluruh warga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Desa Jambal Makmur menunjukkan kondisi yang belum optimal pada keempat dimensinya. Partisipasi dalam pengambilan keputusan belum berjalan secara substantif karena dominasi elite desa dan minimnya keterlibatan aktif warga umum dalam forum deliberasi, pelaksanaan berjalan cukup baik melalui semangat gotong royong, pemanfaatan hasil belum terdistribusi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat, dan evaluasi menjadi dimensi yang paling lemah akibat minimnya transparansi anggaran serta terbatasnya saluran aspirasi formal di luar forum Musrenbangdes.

Kondisi tersebut disebabkan oleh sejumlah hambatan struktural, antara lain dominasi elite desa dalam forum deliberasi, rendahnya literasi kebijakan warga, dan belum optimalnya fungsi BPD sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan Musrenbangdes berbasis inklusi dan transparansi serta peningkatan kapasitas BPD menjadi langkah strategis yang mendesak agar partisipasi masyarakat Desa Jambal Makmur dapat bergerak dari sekadar tokenisme menuju partisipasi yang benar-benar bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, D., & Martini, R. (2023). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa: Studi kasus di desa-desa Jawa Barat. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*, 5(1), 45–62.
- Haryanto, T. (2020). Inklusivitas gender dalam forum Musrenbang: Keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 112–129.
- Nugroho, A., & Fatimah, S. (2022). Partisipasi lintas kelompok dalam perencanaan pembangunan desa: Tantangan inklusi dan representasi. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(1), 87–104. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i1>
- Prianto, A. L., & Kurniawan, B. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa: Konsep, praktik, dan tantangan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 130–148.

***PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JAMBAI
MAKMUR KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK***

Dandi Dio Ramdani Pradimas¹, M. Anggi Syahputra², Elly Nielwaty³

- Safitri, N., Hidayati, R., & Prasetyo, D. (2022). Dimensi partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa: Analisis empiris di wilayah pedesaan Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 215–233.
- Setiawan, R., & Hidayat, M. (2021). Literasi kebijakan dan aksesibilitas informasi anggaran sebagai faktor penentu partisipasi warga dalam perencanaan pembangunan desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 25(1), 63–80.
- Wijaya, H., & Suharto, E. (2021). Tata kelola desa inklusif: Legitimasi, partisipasi, dan efektivitas kebijakan publik di tingkat desa. *Jurnal Sosial Politik*, 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.22219/jsp.v7i1>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.